

**PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM  
PENGELOLAAN OBJEK WISATA DI DESA SIPPAN  
KABUPATEN SIMALUNGUN PROVINSI  
SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**NOVITA RATNA SARI BR SIREGAR  
208510024**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/24

**PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM  
PENGELOLAAN OBJEK WISATA DI DESA SIPPAN  
KABUPATEN SIMALUNGUN PROVINSI  
SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/24

**LEMBAR PENGESAHAN**

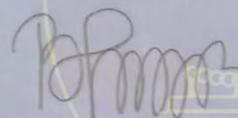
JUDUL : Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengelolaan  
Pariwisata Di Desa Sippan Kabupaten Simalungun Provinsi  
Sumatera Utara.  
NAMA : Novita Ratna Sari Br Siregar  
NPM : 208510024  
FAKULTAS : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh :

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr Budi Hartono, M.Si**



**Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si**

Mengetahui :

Dekan Fakultas ISIPOL

Ka Prodi Ilmu Pemerintahan



**Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP**

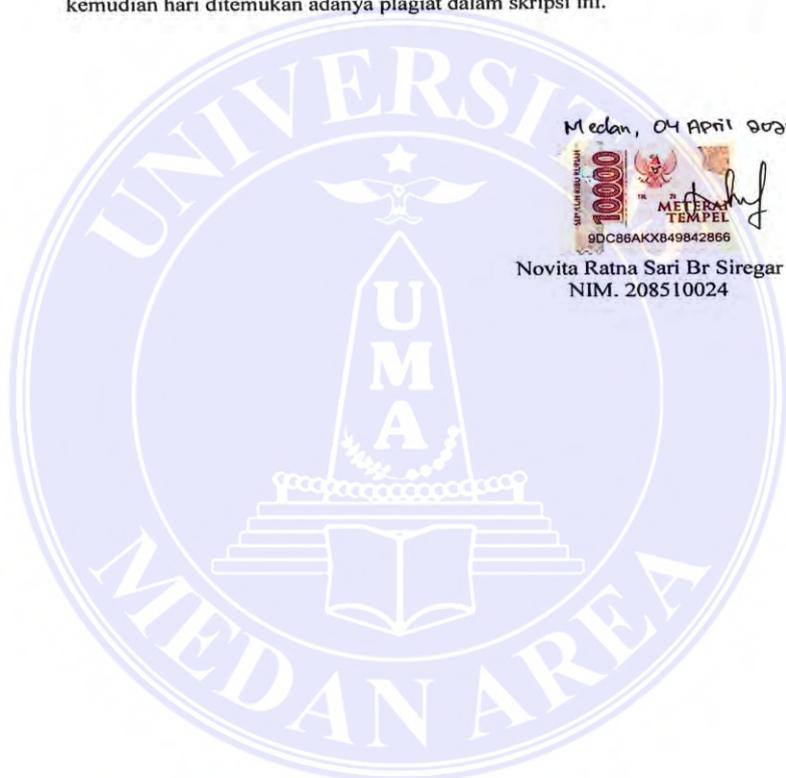


**Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si**

### HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelarsarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernyasecara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi- sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novita Ratna Sari Br Siregar  
NPM : 208510024  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pengelolaan Pariwisata Di Desa Sippan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.

berserta perangkat. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan  
Pada Tanggal : 04 April 2024  
Yang Menyatakan

  
Novita Ratna Sari Br Siregar  
NIM: 208510024

**ABSTRAK**

**PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM  
PENGELOLAAN OBJEK WISATA DI DESA SIPPAN  
KABUPATEN SIMALUNGUN PROVINSI  
SUMATERA UTARA**

Novita Ratna Sari Br Siregar  
NPM : 208510024

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun selaku pengelola objek wisata Desa Sippan memiliki Peran penting untuk pengelolaan objek wisata desa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran oleh Pitana dan Gayatri (2005:95), penelitian ini menggunakan metodologi jenis kualitatif yang menggunakan teknik wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun telah melaksanakan perannya namun belum maksimal, hal tersebut diketahui melalui tiga indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu motivator, peran Dinas pariwisata Simalungun sebagai motivator sudah dilakukan seperti sosialisasi, sadar akan wisata kepada masyarakat setempat namun masih, fasilitator, peran dinas Pariwisata sebagai fasilitator belum terlihat jelas dilakukan dikarenakan masih banyak fasilitas umum yang belum dibenahi seperti sarana dan prasarana di area objek wisata desa Sippan antara lain toilet dan aksesibilitas yang masih rusak dan dinamisator, peran Dinas Pariwisata Simalungun sebagai dinamisator belum dilakukan dengan baik dikarenakan belum ada laporan dari pemerintah desa Sippan akan apa yang mereka butuhkan sehingga nantinya dinas Pariwisata akan memilih kerja sama yang seperti apa agar cocok dalam pengelolaan objek wisata Desa Sippan semakin baik untuk kedepannya.

**Kata Kunci:** Peran, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Desa Sippan

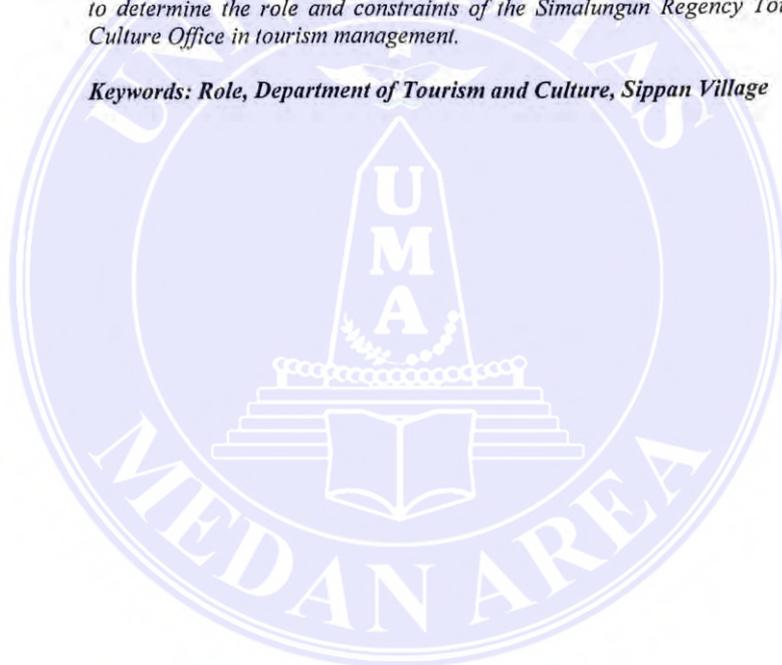
**ABSTRACT**

***The Role of the Tourism and Culture Office in Tourism Management in Sippan Village, Simalungun Regency, North Sumatra Province***

Novita Ratna Sari Br Siregar  
NPM : 208510024

*The Simalungun Regency Tourism and Culture Office as the manager of the Sippan Village tourist attraction has an important role in managing village tourism objects. The theory used in this study is the role theory by Pitana and Gayatri (2005:95), this research uses a qualitative type methodology that uses interview techniques, observation, and also documentation. As reinforcement, this study also consisted of key informants, main informants and additional informants using data analysis techniques by Miles and Huberman namely data collection, data reduction, data presentation and conclusions. The purpose of this study was to determine the role and constraints of the Simalungun Regency Tourism and Culture Office in tourism management.*

***Keywords: Role, Department of Tourism and Culture, Sippan Village***



## RIWAYAT HIDUP

Nama : Novita Ratna Sari Br Siregar  
Tempat dan Tgl Lahir : Mulioarjo , 27 November 1995  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Mahasiswa

Pendidikan Formal :

2019 – Sekarang : Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fisipol UMA  
2010 – 2013 : SMK Negeri 9 Medan  
2007 – 2010 : SMP Negeri 2 Sunggal  
2001 – 2007 : SD Negeri 106146 Mulioarjo

Alamat Rumah : Medan-Binjai Km 12,5. Jl. Orde Baru Gg. Kutilang, Kec, Sunggal, Kab. Deli Serdang

E-mail : novitaratnasarisiregar7@gmail.com  
Tlf / Hp : 085359902134



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi penelitian ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini ialah, **“Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Desa Sippan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan baik dari segi moral dan maupun material. Maka dari itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. M. Erwin Siregar, MAB selaku Ketua Yayasan Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Walid Musthafa Sembiring, S,Sos, M.IP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr Budi Hartono M,Si, selaku pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam penulisan proposal penelitian ini.
5. Ibu Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si selaku Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Medan Area dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam penulisan proposal penelitian.

6. Bapak Khairullah, S.I.kom, M.I.kom selaku sekretaris dalam penulisan proposal penelitian ini
7. Seluruh Dosen dan Staff Pegawai Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
8. Orang Tua terkhususnya ayah tercinta Kesar Agustus Siregar dan ibu tercinta Tiurama Br Tambunan, Serta adik-adik tercinta yang senantiasa memberikan doa serta dukungan penuh kepada peneliti.
9. Seluruh teman-teman Angkatan 2017 & Angkatan 2019 Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan semangat pada saya untuk penyelesaian proposal skripsi ini.

Penulis juga menyadari, tugas pembuatan skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan proposal ini. Penulis berharap tugas proposal ini dapat bermanfaat bagi kalangan pendidik maupun masyarakat. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 28 November 2022

Penulis

**Novita Ratna Sari Br Siregar**  
**NPM. 208510024**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	
<b>ABSTRACT</b> .....	
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1 Peran .....	8
2.2 Pengelolaan Pariwisata .....	19
2.3 Kerangka Berfikir .....	29
2.4 Penelitian Terdahulu .....	31
2.5 Penelitian Terdahulu .....	28
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	35
3.2. Informan Penelitian.....	36
3.3. Teknik Pengumpulan data.....	36
3.4. Teknik analisis data .....	37
3.5. Lokasi dan Jadwal Penelitian .....	45
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>44</b>
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Simalungun .....	44
4.2 Hasil Penelitian .....	66

4.3 Pembahasan Penelitian Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Pariwisata desa Sippan .....	69
4.4 Kendala yang dialami Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun ....	74
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>76</b>
5.1 Kesimpulan .....	76
5.2 Saran .....	77
<b>DAPTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Simalungun .....	3
Tabel 1.2 Kondisi Jalan Darat Antar Desa Keseluruhan 2020 .....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel 3.1 Informan Penelitian .....	36
Tabel 3.2 Rincian Jadwal Penelitian.....	44
Tabel 4.1 Data Statistik Kunjungan Wisatawan Kab. Simalungun 2022 .....	67
Tabel 4.2 Sasaran Kinerja Dinas Pariwisata Simalungun 2022 .....	68



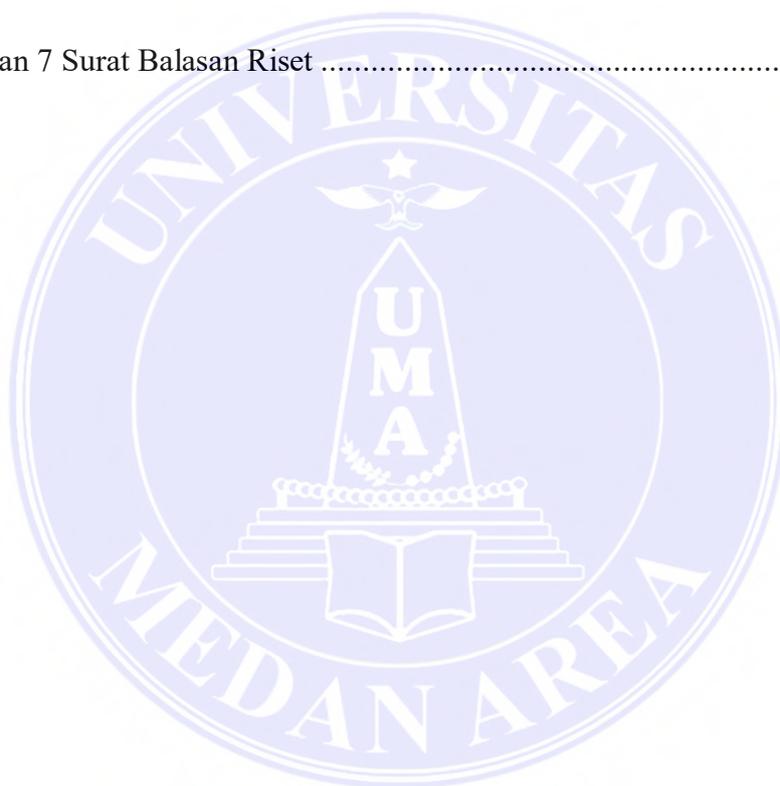
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	29
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data .....	41
Gambar 4.1 Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Simalungun .....	48



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Observasi.....	82
Lampiran 2 Pedoman Wawancara .....	83
Lampiran 3 Hasil Observasi .....	85
Lampiran 4 Hasil Wawancara .....	86
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian.....	92
Lampiran 6 Surat Izin Riset.....	96
Lampiran 7 Surat Balasan Riset .....	97



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak ragam budaya, adat istiadat dan kebudayaan-kebudayaan lainnya. Pariwisata telah menjadi salah satu industri terbesar di dunia dan merupakan andalan utama dalam menghasilkan devisa diberbagai negara. Pada dasarnya pariwisata di Indonesia pada dasarnya menggunakan konsep pariwisata budaya (*cultural tourism*), seperti dilakukan dengan pertimbangan, bahwa Indonesia memiliki potensi seni dan budaya yang beraneka ragam dari tersebar pada setiap daerah tujuan wisata di Indonesia. (Yoeh 2006:1).

Pengelolaan kawasan pariwisata merupakan bagian kegiatan ekonomi yang multi dimensional dan tidak hanya mempunyai output ekonomi atau nilai financial yang diperoleh tetapi juga menyangkut persoalan agama, sosial, budaya dan keamanan yang bahkan menjadi ruh pariwisata untuk dieksploitasi menjadi daya tarik wisata yang mempunyai daya jual tinggi. Pariwisata berkembang menjadi industri pariwisata yang melibatkan berbagai pihak yang bahkan antar daerah atau Negara.

Daerah merupakan bagian dari suatu wilayah sebagai teritorial yang di tentukan atas pengertian batasan dan wewenang administrasi yang didasarkan pada perundang-undangan. Dalam undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat serta pengusaha.

Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan maksud untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. ( Marpaung dan Bahar, 2000:46-47).

Pemerintah mempunyai otoritas dalam penyediaan, pengaturan, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata, pemerintah juga bertanggung jawab dalam menentukan arah pengelolaan yang berperan dalam memainkan peran masing-masing.

Beberapa kebijakan pemerintah dalam sektor pariwisata diantaranya Pembinaan dan Pengelolaan Kepariwisata seperti mengencarkan promosi pariwisata, menyiapkan dan meningkatkan mutu pelayanan dan mutu produk wisata, mengembangkan kawasan-kawasan pariwisata dan produk-produk baru terutama di wilayah timur Indonesia, meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Alam ) di bidang kepariwisataan, dan melaksanakan kampanye nasional yang berkesinambungan. Kabupaten Simalungun adalah salah satu kabupaten yang berada pada wilayah di Provinsi Sumatera Utara. Salah satu objek wisata yang berada di Kabupaten Simalungun yaitu wisata Desa Sippan, dimana terdapat suatu objek wisata yang memiliki potensi yang bagus untuk pengembangan pembangunan, pertumbuhan dan pelayanan serta, pusat industri nasional. Dengan memiliki keberagaman pariwisata yang menjadi poin daya tarik, baik wisatawan domestik maupun wisatawan.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik ke Daerah Kabupaten Simalungun**

No	TAHUN	JUMLAH WISATAWAN DOMESTIK (ORANG)
1	2018	85.672
2	2019	60.543
3	2020	93.651
4	2021	95.782

*Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun*

Berdasarkan pada Tabel 1.1 di atas terlihat mengalami peningkatan jumlah kunjungan tertinggi pada tahun 2021 yang berjumlah 95.782 orang, sedangkan jumlah kunjungan paling sedikit terjadi pada tahun 2019 berjumlah 60.543 orang. Hal tersebut menurun dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 85.672, penurunan kunjungan wisatawan ini berkisar 25.000 orang. Tetapi terjadi peningkatan secara terus menerus pada tahun 2019 hingga 2021 dimana jumlah peningkatannya berkisar 1000 orang pertahunnya.

**Tabel 1.2**  
**Kondisi Jalan Darat Antar Desa Kelurahan di Kecamatan**  
**Pamatang Silimahuta, 2020**

NO	Desa/Kelurahan	Jenis Permukaan Jalan	Dapat dilalui Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih
1	Ujung Seribu	<i>Diperkeras (kerikil, batu, dll)</i>	Sepanjang Tahun
2	Silimakuta Barat	<i>Diperkeras (kerikil, batu, dll)</i>	Sepanjang Tahun
3	Siboras	<i>Diperkeras (kerikil, batu, dll)</i>	Sepanjang Tahun
4	Ujung Meriah	<i>Diperkeras (kerikil, batu, dll)</i>	Sepanjang Tahun
5	Mardinding	<i>Diperkeras (kerikil, batu, dll)</i>	Sepanjang Tahun
6	Naga Seribu	<i>Diperkeras (kerikil, batu, dll)</i>	Sepanjang Tahun
7	Seribu Jadi	<i>Diperkeras (kerikil, batu, dll)</i>	Sepanjang Tahun
8	Sinar Naga Maria	<i>Diperkeras (kerikil, batu, dll)</i>	Sepanjang Tahun
9	Bandar Seribu	<i>Diperkeras (kerikil, batu, dll)</i>	Sepanjang Tahun
10	Naga Bosar	<i>Diperkeras (kerikil, batu, dll)</i>	Sepanjang Tahun

Dari Tabel 1.2 diatas dapat kita lihat 10 desa/kelurahan dengan kondisi permukaan jalan yang hampir sama, yakni kerikil dan berbatu. Terutama pada kelurahan Naga Seribu, dimana kelurahan ini terdapat objek wisata Desa Sippan sehingga dengan kondisi permukaan jalan seperti peneliti jelaskan di atas 5 mempengaruhi terhadap pengelolaan pariwisata di Desa Sippan terhadap kondisi infrastruktur, sehingga harus adanya ikut serta pemerintah dalam pengelolaan objek wisata di Desa Sippan, terutama dalam pengelolaan Infrastruktur.

Wisata ini adalah bukit dataran tinggi yang akhirnya secara atensi wisatawan sejak pertengahan tahun 2021 yang berskala lokal, regional nasional di Desa Sippan. Objek wisata ini merupakan wisata yang dikembangkan dan dikelola oleh Bapak Sinaga yang dibantu oleh pemandu wisata Desa Sippan. Tempat

wisata ini belum banyak dikenal oleh masyarakat luar, namun sudah banyak pengunjung berwisata, dalam upaya pengelolaan wisata ini tidak lepas dari permasalahan. Keunggulan sektor pariwisata dalam konteks regional, Desa Sippan ditunjukkan pula dengan posisi pariwisata yang terletak di Kabupaten Simalungun. Beberapa wilayah menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor keunggulan, dan ada juga beberapa wilayah lainya belum menjadi sektor pariwisata, namun salah satu sumber pendapatan walaupun kontribusinya masih kecil. Tujuan pengelolaan pariwisata Desa Sippan menjadikan pariwisata sebagai bagian dalam mewujudkan dan mengisi pola pembangunan pariwisata nasional, dan salah satu kegiatan ekonomi, serta sumber pendapatan daerah.

Namun demikian pengembangan wisata yang berbasis mandiri ini belum optimal terlaksana, dan bahkan pada kenyataannya hanya bersifat temporer. Selain itu, bentuk pengembangan pariwisata ini belum tersosialisasikan dengan baik melalui sosialisasi oleh Dinas Pariwisata maupun Iklan Layanan Masyarakat. Dengan kondisi seperti ini lokasi wisata Desa Sippan belum berjalan dengan efektif. Mengalir dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk menganalisa lebih dalam terkait dengan pengembangan pariwisata berbasis mandiri dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata di Desa Sippan, Kabupaten Simalungun.

Berdasarkan dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI DESA SIPPAN TIGA RAJA PAMATANG SILIMAHUTA KABUPATEN SIMALUNGUN”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

1. Terbatasnya dana/Modal Usaha
2. Kualitas pemandu wisata lokal yang masih belum profesional
3. Infrastruktur yang masih kurang memadai
4. Belum ada partisipasi pemerintah daerah dan Dinas Pariwisata di Desa Sippan
5. Fasilitas wisata di desa sippan yang masih kurang memadai

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Pemerintah dalam pengelolaan pariwisata di Desa Sippan Tigaraja Silimahuta Kabupaten Simalungun ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan di Desa Sippan Tigaraja Silimahuta Kabupaten Simalungun ?

## 1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Pariwisata di Desa Sippan Tigaraja Kecamatan Silimahuta Kabupaten Simalungun.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pariwisata di Desa Sippan Tigaraja Kabupaten Simalungun.

## 1.5 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Pemerintahan di bidang Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Pariwisata pada Desa Sippan Tigaraja Silimahuta Kabupaten Simalungun.

### 2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangsih kepada Dinas Pariwisata berkaitan dengan Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Pariwisata di Desa Sippan Tigaraja Silimahuta Kabupaten Simalungun.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Peran

##### 2.2.1 Definisi Peran

Menurut Soekanto (2002: 243) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang. Apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahannya mempunyai peranan yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi status sosial.

Adapun syarat-syarat peran dalam Soekanto (2002 : 243) mencakup tiga hal penting, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini, merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Duverger (2010: 103), bahwa arti kata peran dikategorikan dengan baik karena setiap individu merupakan aktor di dalam masyarakat tempat mereka tinggal, dan juga merupakan yang harus memainkan beberapa peran seperti aktor pemain profesional.

Menurut Poerwodarminta (2003: 571), peran adalah perbuatan seorang individu atau sekelompok orang dalam suatu kejadian. Berdasarkan sudut pandang Poerwodarminta, kita dapat mengetahui, bahwa perilaku seseorang dalam situasi tertentu menentukan perannya.

Menurut Riyadi (2002: 138), peran diartikan sebagai posisi dan konsep peran yang dimainkan oleh partai politik dalam konflik sosial. Dalam peran ini, aktor berupa orang atau organisasi bertindak sesuai dengan harapan orang atau lingkungan. Peran juga didefinisikan sebagai persyaratan yang ditetapkan secara struktural (norma, harapan, tabu, tanggung jawab, dan lain-lain).

Pada dasarnya, terdapat tekanan dan kemudahan untuk menghubungkan mentor dan mendukung berfungsinya organisasi. Peran adalah kumpulan tindakan besar dan kecil yang memainkan berbagai peran.

Teori peran menyediakan kerangka kerja konseptual untuk mempelajari perilaku organisasi. Mereka menyatakan dalam Doherty & Pritchard 1985 (2003: 55), bahwa “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”, namun, dalam teori Biddle dan Thomas dalam buku Sarlito Sarwono membagi konsep peran menjadi empat bagian, yaitu:

- a. Setiap orang yang ikut bergabung dalam adanya suatu interaksisosial.

- b. Tingkah laku yang diperlihatkan seseorang dalam suatu interaksi tersebut.
- c. Jabatan atau status sosial yang seseorang perlihatkan dengan sengaja dalam berperilaku.
- d. Hubungan antara seseorang dengan perilaku yang diperlihatkan.

Suhardono (Patoni, 2007: 40) mengatakan bahwa karakter dapat diinterpretasikan dalam beberapa cara, yaitu: Pertama, interpretasi sejarah: konsep karakter yang awalnya berasal dari yang terkait erat dengan drama yang berkembang pesat dan drama Yunani kuno atau Roma yang dipinjam dari orang-orang.

Peran dalam konteks ini, mengacu pada peran yang dibawakan atau dimainkan oleh seorang aktor di atas panggung dengan drama tertentu. Kedua, Konsep peran dalam ilmu-ilmu sosial mengacu pada fungsi yang dimiliki seseorang ketika menempati posisi kedua dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki suatu posisi tertentu, seseorang dapat memainkannya berdasarkan salah satu posisi tersebut.

Menurut Sutarto (2009: 138-139), yaitu:

- a. Konsep peran, yaitu: keyakinan individu atau kelompok tentang hal yang harus dilakukan dalam situasi tertentu.
- b. Ekspektasi peran, yaitu: apa yang diharapkan orang lain dari seseorang yang menduduki atau memegang suatu jabatan, yaitu bagaimana ia harus bersikap.
- c. Perwujudan peran, yaitu: tindakan nyata seseorang dalam kedudukan tertentu. Jika ketiga unsur tersebut selaras, maka interaksi sosial akan lestari dan lancar.

Peran merupakan salah satu yang dapat dikatakan konsep mengenai hal apa yang harus dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam lingkungan warga, dan yang termasuk seperti keharusan dalam berperilaku dari banyak orang pada individu dan juga merupakan tingkah laku dari seseorang individu yang penting untuk suatu struktur sosial di masyarakat.

Menurut Soekanto (2001: 242) terdapat bagian peran sebagai berikut:

1. Peran positif adalah pemberian peran yang dilakukan oleh salah satu dari bagian kelompok untuk memposisikannya pada struktur kelompok untuk mengurus kegiatan kelompok seperti pengurus atau pejabat.
2. Peran partisipatif adalah ketika salah satu anggota kelompok mendelegasikan peran kepada kelompok dari seseorang dan memberikan kontribusi yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
3. Peran pasif adalah kontribusi pasif dari anggota kelompok yang menahan diri dari memberikan kesempatan untuk kegunaan lain dalam kelompok dan memastikan bahwa mereka bekerja dengan baik.

Secara lebih jelas, Pitana dan Gayatri (2005: 95), berpendapat, bahwa pemerintah daerah mempunyai peran dalam mengembangkan potensi pariwisata daerahnya sebagai:

- a. Motivator, dalam hal pengembangan pariwisata, tentunya pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting. Peran pemerintah daerah selaku motivator sangat dibutuhkan dan penting supaya roda usaha pariwisata terus berputar. Dalam hal ini, investor, masyarakat dan juga pengusaha di bidang pariwisata adalah sasaran penting yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata terus berjalan

dengan baik.

- b. Fasilitator, sebagai fasilitator dalam hal pengembangan potensi pariwisata, peran pemerintah ialah berupaya mempersiapkan dan menyediakan semua fasilitas yang diperlukan untuk menyokong semua program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun. Dalam praktiknya, pemerintah dapat bekerja sama dengan semua pihak secara bersamaan, termasuk swasta dan masyarakat. Fasilitator, sebagai fasilitator dalam hal pengembangan potensi pariwisata, peran pemerintah ialah berupaya mempersiapkan dan menyediakan semua fasilitas yang diperlukan untuk menyokong semua program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langka. Dalam praktiknya, pemerintah dapat bekerja sama dengan semua pihak secara bersamaan, termasuk swasta dan masyarakat.
- c. Dinamisator, dalam pilar-pilar pemerintahan yang baik, untuk menjamin kesinambungan pembangunan yang seimbang, pemerintah, swasta, dan masyarakat harus berupaya untuk mendayagunakan sinergi fungsi masing-masing dengan baik. Sebagai salah satu pemangku kepentingan pengembangan pariwisata, pemerintah daerah dapat memainkan efek sinergis dari ketiga variabel tersebut agar dapat melakukan segala upaya untuk menciptakan hubungan simbiosis bagi kebangkitan pariwisata pada masa yang akan datang.

Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ialah menjalankan urusan pemerintahan menggunakan pengelolaan pariwisata dan yang terdapat pada suatu daerah. Artinya mengajak warga buat memanfaatkan perannya bersamasama

menyebarkan informasi pariwisata yang ada di wilayah tersebut.

Sesuai dengan pendapat ahli di atas penulis menyimpulkan, bahwa peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun merupakan motor penggerak bagi masyarakat setempat untuk senantiasa mendukung (memotivasi) pengembangan pariwisata di daerahnya. Terdapatnya kerjasama sinergis dengan fasilitas penunjang pariwisata (fasilitator) dan berbagai pemangku kepentingan pariwisata (dinamisator). Dari pernyataan tersebut, merupakan definisi perilaku yang membatasi individu atau organisasi untuk dapat melakukan aktivitas berdasarkan kondisi yang disepakati bersama. Berdasarkan definisi di atas kita tahu bahwa peran bisa dikatakan peran jika seseorang memiliki status sosial tertentu yang membuatnya memiliki peran akan sesuatu.

### **2.2.1 Definisi Pemerintah**

Istilah pemerintah berasal dari kata “Perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintah. Istilah Pemerintah diartikan dengan perbuatan (cara, hal, urusan, dan sebagainya). Pemerintah merupakan semua aparatur/alat perlengkapan negara dalam rangka menjalankan segala tugas dan kewenangan/kekuasaan negara, baik kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Apabila kita lihat pada Negara Indonesia saat ini dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan perundangundangan yang tertinggi.

Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya.

Dalam hal ini, segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di daerahnya, sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Peran pemerintah sebagai regulator merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan atau kebijakan mengenai regulasi (Ryaas Rasyid, 2010).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi, dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Maksud dari Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah lembaga atau instansi yang bertanggung jawab sepenuhnya dari penyelenggaraan pengelola wisata pada Desa Sippan Tiga Raja Silimahuta Kabupaten Simalungun. Dalam wisata ini yang berperan sebagai pemeran utama adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kuncoro (2004: 113-114) menyatakan bahwa peran pemerintah dapat mencakup peran-peran wirausaha (*entrepreneur*), koodinator, fasilitator dan stimulator.

- a. Wirausaha (*entrepreneur*), sebagai wirausaha pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan bisnis. Tanah atau bangunan dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan konservasi atau alasan-alasan lingkungan lainnya, dapat juga untuk alasan perencanaan pembangunan atau juga dapat digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang bersifat ekonomi. Hal tersebut bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat, dan bisa mensejahterakan perekonomian di sekitar.
- b. Koordinator, pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perencanaan pengembangan pariwisata daerah atau perencanaan pengembangan ekonomi daerah yang telah dipersiapkan di wilayah tertentu, mencerminkan kemungkinan pendekatan dimana sebuah perencanaan disusun sebagai suatu kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok masyarakat lainnya.
- c. Fasilitator, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini dapat meliputi efisiensi proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan.
- d. Stimulator, pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus, yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut, dan menjaga agar perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut,

serta menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah dapat mempromosikan tema atau kegiatan khusus di objek wisata tertentu.

Davey (1998:21) memaparkan, bahwa terdapat lima fungsi utama pemerintahan, antara lain : Pertama sebagai penyedia layanan, yaitu fungsifungsi pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakatnya. Kedua, fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakkan peraturanperaturan. Ketiga, fungsi pembangunan yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Keempat, fungsi perwakilan yaitu mewakili masyarakat di luar wilayah mereka. Kelima, fungsi koordinasi yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengkoordinasian, perencanaan, dan investasi.

Dari semua pengertian di atas penulis mengambil kesimpulan peran pemerintah adalah perilaku seseorang yang diperlihatkan atau diterapkan di lingkungan sekitarnya. Ia memiliki tugas yang diterima dan di jalankannya. Peran juga memiliki tanggung jawab yang harus dijaga dan diembannya agar tercapainya tujuan bersama dan tujuan pada pribadi sendiri.

Maksudnya jika peranan itu dilakukan untuk diri sendiri, tentu ia memiliki tujuan tersendiri pula, jika peranan itu dilakukan dalam organisasi, maka tujuan yang akan dicapai adalah tujuan bersama. Peranan tentu memiliki batasan-batasan masing-masing yang dimaksud tugas dan pokok agar terstruktur dengan baik.

### 2.1.3 Peran Pemerintah

Menurut Abraham (dalam Tjokoamidjojo, 1988: 18 ) peranan pemerintah dapat juga dilihat dari tiga bentuk, sebagai berikut :

1. Mula-mula peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan.
2. *Service State*, dimana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Hal ini juga didasari oleh banyak pikiran-pikiran mengenai Welfare State atau negara kesejahteraan.
3. Terdapat pula suatu cara dalam pelaksanaan peranan pemerintah, yang memberikan kepada pemerintah sebagai enterpeuner atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi "*development agent*" atau unsur pendorong pembaharuan/pembangunan.

Tjokroamidjojo (1988: 19) Klasifikasi lain dari cara pelaksanaan peranan pemerintah ini dapat dikemukakan pula pikiran dari Irving Swedlow, yang menyebutkan bahwa *involvement* atau campur tangan pemerintah dalam proses perkembangan kegiatan masyarakat (jika lebih positif merupakan proses pembangunan), dapat dilakukan dengan lima macam cara yaitu:

1. Operasi langsung (*operation*): pada pokoknya pemerintah menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan tertentu.
2. Pengendalian langsung (*direct control*): penggunaan perizinan, lisensi (untuk kredit, kegiatan ekonomi lain), penjataan dan lain-lain. Hal ni dilakukan oleh badan-badan pemerintahan yang "*acton ladern*" (yang

berwenang dalam berbagai perizinan, alokasi, tarif dan lain-lain) atau kalau tidak, berusaha untuk menjadi *action ladern*.

3. Pengendalian tak langsung (*indirect influence*) ini adalah bentuk onvolement yang paling ringan. Misalnya, hanya memberikan informasi, menjelaskan kebijaksanaan pemerintah, contoh-contoh teladan tentang efisiensi dan ketidakborosan. Ada lagi misalnya penyuluhan dan pembinaan untuk lebih menerima hal-hal yang baru (*promoting a receptive attitude toward innovation*).

Peranan pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Sondang P.Siagian dalam bukunya Administrasi Pembangunan (2009: 132) peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk, seperti: fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan.

Peran pemerintah penting dalam hal menciptakan keamanan dasar (*basic security*) hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan sosial (Sumardi, 2010: 21).

Peran pemerintah merupakan gerak aktualisasi kedaulatan negara dalam mencapainya tujuannya yang dikendalikan oleh norma dan nilai dasar dalam hubungan interaksi dengan lingkungan (Sitanggang, 1996: 134). Pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan, bahwa peranan pemerintah ialah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, guna mencapai tujuan yang ingin dikehendaki. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ndraha (2011) peranan pemerintah adalah proses pemenuhan kebutuhan pihak yang diperintah akan jasa

publik yang tidak diprivatisasikan, dan layanan kepada setiap orang pada saat diperlukan sehingga menimbulkan hubungan transaksional, sebagai berikut:

1. Pemerintah menawarkan berbagai pilihan produk kepada masyarakat, setiap pilihan berisi janji.
2. Setiap warga masyarakat bebas memilih produk yang dianggapnya sesuai dengan aspirasinya. Kebebasannya itu dilindungi dan dijamin melalui *civil service*.
3. Jika konsumen telah menjatuhkan pilihan diantara produk yang ditawarkan, maka produsen/penjual (pemerintah) harus menepati janjinya

## 2.2 Pengelolan Pariwisata

### 2.2.1 Definisi Pengelolaan

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (2010) pengelolaan di definisikan sebagai berikut :

- a. Proses, cara dan perbuatan.
- b. Proses melakukan perbuatan tertentu dengan menggerrakkan tenaga orang lain.
- c. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.
- d. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut (Terry, 2009) pengelolaan (*management*) merupakan sebuah proses khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan sumber-sumber lainnya.

Suprpto (2009) mendefinisikan manajemen sebagai seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengontrolan atas *human and national resources (terutama human resources)* untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu. Pengelolaan merupakan suatu proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

- a. Perencanaan (*planning*) adalah suatu pemeliharaan yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan, dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi mencapai hasil yang dikehendaki.
- b. Pengorganisasian (*organizim*) adalah penentuan, pengelompokan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan.
- c. Pelaksanaan (*actuating*), adalah usaha agar setiap anggota kelompok mengusahakan pencapaian tujuan dengan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian.
- d. Pengawasan (*controlling*) adalah proses penentuan apa yang seharusnya diselesaikan yaitu penilaian pelaksanaan bila perlu melakukan tindakan korektif agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana.

Dalam pengelolaan pariwisata ini, UU No.32 Pasal 1 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pengembangan pariwisata yang berbasis pada masyarakat harus memperhatikan empat pertimbangan utama yaitu :

1. Aksesibilitas dengan isu pokok kenyamanan dan keadaan.
2. Pelestarian lingkungan isu pokok manfaat dan siklus bisnis.

3. Kemajuan ekonomi isu pokok manfaat dan siklus bisnis.
4. Pengelolaan yang berkesinambungan isu pokok tujuan dan metode.

Di dalam menghadapi isu pokok pertimbangan utama dalam pengembangan pariwisata perlu dipersiapkan sebagai respon strategis antara lain:

- a. Jalur-jalur transportasi dan terminalnya.
- b. Keramahtamahan pelayanan.
- c. Penggarapan pelayanan.
- d. Penonjolan penyajian warisan budaya lokal.
- e. Investasi dan penyerapan tenaga kerja lokal.
- f. Kesertaan masyarakat dalam segala kegiatan.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintahan No.67 Tahun 1996, tentang pengelolaan dan pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam meliputi 5 hal, yaitu :

1. Pembangunan sarana dan prasarana pelengkap beserta fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan.
2. Pengelolaan objek dan daya tarik wisata alam termasuk sarana dan prasarana yang ada.
3. Penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat dan sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.
4. Penyelenggaraan persetujuan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap objek wisata dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.
5. Penyelenggaraan persetujuan seni budaya yang dapat memberi nilai

tambah terhadap objek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.

### 2.2.2 Definisi Pariwisata

Menurut Mathieson dan Wall (dalam Pitana dan Gyatri, 2005), pariwisata adalah suatu kegiatan yang memindahkan orang untuk sementara waktu ke suatu tujuan di luar rumah dan tempat kerjanya serta melakukan kegiatan di sana, juga menyiapkan fasilitas untuk memenuhi kebutuhannya. Di sisi lain, menurut Kurniansah (2014: 28), pariwisata bertujuan untuk menemukan keserasian dan kesejahteraan lingkungan dalam konteks alam sosial budaya, dari satu tempat ke tempat lain, baik sendiri maupun berkelompok.

Selama ini, pariwisata dikenal sebagai salah satu industri penting yang diharapkan dapat menghasilkan devisa negara. Dalam buku *Sociology of Tourism* karya Pitana dan Gayatri, dari segi sosiologis, John Urry (1990) mengemukakan bahwa pariwisata memiliki ciri-ciri, sebagai berikut:

- a. Pariwisata dapat dikatakan aktivitas yang dilakukan secara santai atau pada saat ada waktu luang. Dimana, melakukan perjalanan dengan tujuan berwisata bukan merupakan suatu keharusan atau kewajiban. Pada umumnya dilakukan seseorang pada saat mereka sedang libur atau cuti. Pergi berwisata dikenal dengan pergi berlibur ke daerah yang bukan daerah tempat seseorang tinggal. Kebiasaan berlibur ini akhirnya menjadi suatu tanda dari adanya masyarakat modern.
- b. Kaitan yang ada pada pariwisata muncul diakibatkan oleh terjadinya pergerakan banyak orang yang berhubungan dengan dimensi dan waktu. Adanya pergerakan yang singkat atau kunjungan yang singkat inilah yang dapat dilihat perbedaannya dengan perpindahan penduduk secara menetap.

- c. Sifat sementara terkait aktivitas wisata ini dikatakan tidak normal, dimana pelaku akan berkeinginan untuk balik ke keadaan biasanya atau tempat asalnya.
- d. Wilayah yang didatangi oleh pengunjung tidak ada kaitannya dengan pekerjaan atau kehidupan seorang pengunjung. dan pengunjung tidak ada niat menghasilkan pendapatan dari wilayah yang didatangi.
- e. Pariwisata telah menjadi wahana sosialisasi, karena banyaknya kuantitas dari masyarakat yang ikut berperan dalam geliat kegiatan pariwisata. Destinasi wisata yang dipilih juga berdasarkan fantasi dan citra objek wisata yang berkaitan. Citra dan fantasi ini muncul melalui karya akademis, pertemuan akademis, seperti lokakarya, seminar, dan media massa.
- f. Berwisata juga mengharapkan pengalaman yang tidak biasa atau sesuatu yang baru. Kualitas dan kuantitas perjalanan ini yang akan ditentukan menjadi pengalaman baru.
- g. Sebuah simbol menjadi penanda besar akan keberhasilan sebuah destinasi wisata. Contohnya, *the exotic Bali, the romantic Paris, Lake Toba dan the virgin Pacific*.
- h. Pengembangan yang dilakukan oleh para profesional pada setiap destinasi wisata mempunyai pengaruh yang menebar luas terhadap kebudayaan, karena pengembangan ini akan memunculkan pro, kontra terhadap berbagai modifikasi kebudayaan.

Hadiwijoyo (2012: 41) berpendapat, bahwa pariwisata merupakan sesuatu yang dilakukan dengan tujuan wisata yang berhubungan dengan perjalanan dalam

rangka rekreasi, pelancongan, dan *turisme*. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang mendefinisikan kepariwisataan sebagai berbagai kegiatan kepariwisataan yang didukung oleh berbagai fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah bertujuan untuk:

- a) Bertujuan untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi
- b) Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c) Bertujuan untuk menghapus kemiskinan
- d) Bertujuan untuk mengatasi pengangguran
- e) Bertujuan untuk melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
- f) Bertujuan untuk memajukan kebudayaa
- g) Bertujuan untuk mengangkat citra bangsa; h) Bertujuan untuk memupuk rasa cinta tanah air
- h) Bertujuan untuk memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa
- i) Bertujuan untuk mempererat persahabatan bangsa.

Youti (1991: 103) mengemukakan bahwa kata pariwisata berasal dari dua kata, yaitu kata “Pari” dan kata “Wisata”. Kata Pari dimaknai sebagai “berkalikali, berputar-putar, dan lengkap”, dan pariwisata diartikan sebagai “*travel or trip*”, yang sinonim dengan “*reave*” dalam bahasa Inggris.

Pada dasarnya, definisi pariwisata tidak akan bisa sama persis pengertiannya di antara para ahli. Pariwisata merupakan kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang yang sedang memiliki waktu luang, atau menyediakan waktu untuk perjalanan wisata yang tujuannya menghibur. Pada umumnya, seseorang berwisata, karena adanya motivasi oleh beberapa hal yang dikelompokkan sebagai

berikut:

- a. *Physical or physiological motivation* yaitu motivasi biologis atau biologis seperti relaksasi, kesehatan, kenyamanan. Berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, bersantai dan banyak lagi.
- b. *Cultural motivation* diartikan sebagai rasa ingin tahu untuk mempelajari suatu budaya, adat istiadat, tradisi, dan kesenian daerah lain. Hal ini termasuk ketertarikan terhadap objek-objek keberadaan budaya.
- c. *Social or Interpersonal Motivation* diartikan sebagai motivasi seseorang untuk melakukan perjalanan, dikatakan bersifat sosial. Misalnya mengunjungi teman lama dan kerabat atau keluarga, untuk bertemu dengan pasangan atau rekan kerja, untuk melakukan hal-hal yang dianggap membawa gengsi, atau untuk melarikan diri dari keterpurukan, seperti rutinitas yang terlalu membosankan dan sebagainya.
- d. *Fantasy motivation* adalah motif atau keyakinan eksistensial bahwa di bidang lain, seseorang akan dapat membebaskan diri dari kebosanan kehidupan sehari-hari, dan diharapkan dapat memberikan kepuasan psikologis (Murphy, 1985; dan Pitana, 2005).

### 2.2.3 Pengelolaan Pariwisata

Pengertian lain tentang pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien, guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya (Harsoyo, 1977).

Dari kedua pendapat ahli tersebut lebih dikuatkan lagi dengan pengertian

pengelolaan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Wardoyo, 1980).

Pengelolaan pariwisata haruslah pengelolaan yang berkelanjutan untuk menjadikan pariwisata tersebut sebagai daya tarik bagi wisatawan. Menurut Dutton dan Hal (dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata) pengelolaan berkelanjutan adalah pengelolaan yang dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia saat ini, tanpa mengorbankan potensi pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia di masa mendatang. Pada kondisi ekologis tersebut seharusnya ditambahkan faktor-faktor sosial yang berpengaruh langsung pada berkelanjutannya interaksi antara kelompok masyarakat dan lingkungan fisiknya.

Objek dan daya tarik wisata umumnya terdiri atas hayati dan non hayati, dimana masing-masing memerlukan pengelolaan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya. Pengelolaan objek dan daya tarik wisata harus memperhitungkan berbagai sumber daya wisatanya secara berdaya guna agar tercapainya sasaran yang diinginkan. Dalam menunjang pengelolaan berbagai kegiatan kepariwisataan, teknologi manajemen perlu diterapkan agar sumber daya wisata yang murni alami dapat direkayasa secara berhasil guna, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitasnya termasuk lingkungan alamnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996, Pengelolaan dan pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam meliputi 3 hal yaitu :

1. Pembangunan sarana dan prasarana pelengkap beserta fasilitas pelayanan lain bagi pariwisata. Pengelolaan objek dan daya tarik wisata alam, termasuk sarana dan prasarana yang ada.

2. Penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan pengusaha objek dan daya tarik wisata alam bersangkutan.
3. Penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap objek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.

### 2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ialah rangkaian pemaparan dan penjelasan terhadap sesuatu yang menjadi inti permasalahan, kerangka konsep yang disusun apa yang tertulis dalam berdasarkan latar belakang masalah, apa yang menjadi rumusan masalah serta hasil yang didapatkan dari penelitian yang relevan. Secara lebih jelas, ukuran yang akan digunakan dalam pembahasan peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah teori dari Pitana dan Gayatri (2005:95), yang berpendapat bahwa pemerintah daerah memiliki peran dalam urusan mengembangkan potensi pariwisata daerahnya sebagai motivator, fasilitator dan dinamisor.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai peran pemerintah dalam pengelolaan pariwisata di Desa Sippan Tigaraja Silimahuta Kecamatan Silimahuta Kabupaten Simalungun. Kabupaten Simalungun adalah salah satu Kabupaten yang berada pada wilayah di Provinsi Sumatera Utara. Salah satu objek wisata yang berada di Kabupaten Simalungun yaitu wisata Desa Sippan, Desa Sippan terdapat suatu objek wisata yang memiliki potensi yang bagus untuk pengembangan pembangunan, pertumbuhan dan pelayanan, pusat industri nasional. Dengan memiliki keberagaman pariwisata yang menjadi poin daya tarik baik wisatawan domestic dan internasional. Tempat wisata ini belum banyak dikenal oleh

masyarakat luar, namun sudah banyak pengunjung berwisata, dalam upaya pengelolaan wisata ini tidak lepas dari permasalahan. Posisi sektor pariwisata kabupaten Simalungun sangat penting sebagai salah satu bisnis inti kabupaten Simalungun. Dengan penetapan pariwisata sebagai salah satu bisnis inti, perhatian pemerintah terhadap pengembangan pariwisata akan bertambah besar dan pembangunan pariwisata menjadi prioritas.

Berdasarkan teori Pitana dan Gayatri (2005: 95), pemerintah daerah yang dalam hal ini ialah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun memiliki peran dalam mengembangkan potensi daerahnya sebagai:

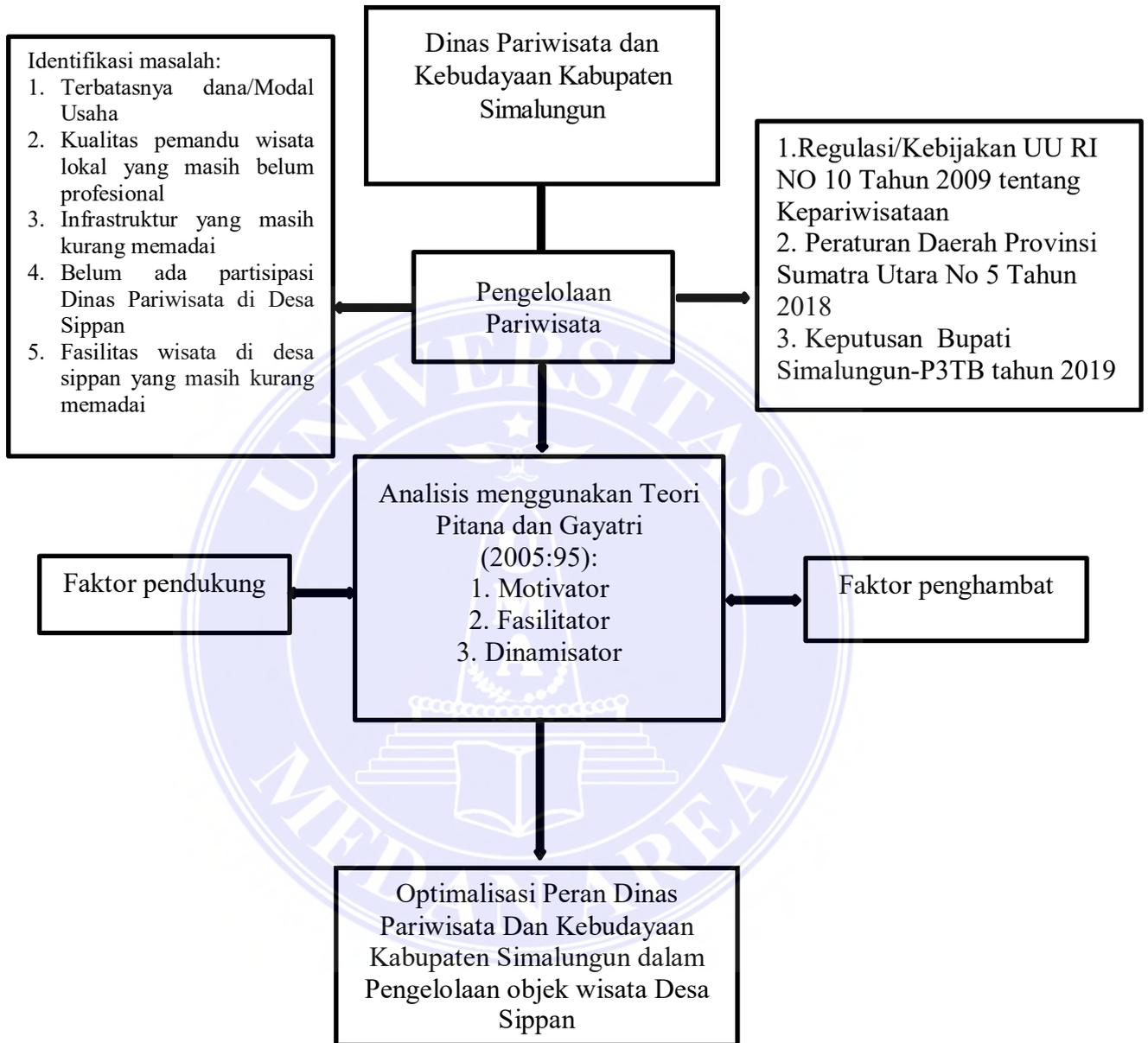
- a. *Motivator*, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai motivator yang berperan dalam pengembangan pariwisata agar geliat pariwisata terus berjalan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun berperan memberikan motivasi kepada investor, masyarakat dan pengusaha yang menjadi sasaran utama di bidang pariwisata agar perkembangan pariwisata terus berjalan dengan baik. Adapun motivasi tersebut berupa dukungan agar investor, masyarakat dan pelaku wisata terus berinovasi, untuk mempersiapkan wisata yang siap didatangi pengunjung.
- b. *Fasilitator*, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun sebagai penyedia segala fasilitas yang diperlukan untuk mendukung segala program yang diadakan. Seperti melengkapi fasilitas umum dan lain sebagainya yang mendukung peraturan daerah.
- c. *Dinamisator*, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Simalungun, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik

agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal. Dalam pengelolaan pariwisata Desa Sippan agar meningkatkan kunjungan wisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai salah satu stakeholder pembangunan pariwisata memiliki peran mensinergikan ketiga pihak tersebut, agar terciptanya simbiosis mutualisme demi peningkatan kunjungan wisatawan di objek wisata Desa Sippan.

Berikut ini skema pemikiran untuk mempermudah memahami penelitian yang dikembangkan penulis dengan baik:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah Peneliti 2022

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti mengacu kepada penelitian terdahulu yang dijadikan acuan untuk melihat dasar atau acuan berupa teori-teori atau temuan melalui hasil sebagai penelitian sebelumnya untuk dijadikan sebagai data pendukung. Penelitian terdahulu dapat dipakai sebagai sumber perbandingan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan dan juga agar mengetahui persamaan dan perbedaannya. Penelitian terdahulu terkait Peran Pemerintah dalam pengelolaan pariwisata, adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama/Judul/Tahun	Uraian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Engga Satruko (2019) Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Teluk Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode : Kualitatif</li> <li>• Teori : Pitana gayatri</li> <li>• J. Informan : 4 orang</li> <li>• T. Pengumpulan data : Observasi, Wawancara, Dokumentasi</li> <li>• T. Analisis data :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reduksi data</li> <li>- Penyajian data</li> <li>- Penarikan kesimpulan</li> </ul> </li> </ul> Lokasi : Kabupaten Tanggamus	Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Tanggamus memiliki kekayaan wisata alam yang dapat di kelola dengan melibatkan segenap elemen masyarakat, sehingga pemerintah daerah memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.	Penelitian ini memiliki persamaan yakni melihat peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pariwisata yang membedakannya dengan penelitian saya penelitian ini terfokus kepada pemberdayaan masyarakatnya untuk pengelolaan objek wisata sedangkan penelitian saya terfokus kepada masih pembedaan sarana dan prasarana dalam pengelolan pariwisata di desa sippan
2	Riska (2020) Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Pariwisata Kebun Raya Massenrempuludi Kabupaten Enrekang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode : Kualitatif</li> <li>• Teori : eksperimen</li> <li>• J. Informan : 5 orang</li> <li>• T. Pengumpulan data : observasi, wawancara, dokumentasi</li> <li>• T. Analisis data :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reduksi data</li> <li>- Penyajian data</li> <li>- Penarikan kesimpulan</li> </ul> </li> </ul> Lokasi : Kabupaten Enrekang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup) dalam pengembangan objek wisata adalah faktor pendukung yaitu motivator dan regulator, Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya penanpungan air, serta keterbatasan dana	Persamaan penelitian ini sama-sama terfokus kepada pengelolan pariwisata sedangkan perbedaannya dengan penelitian saya penelitian ini terfokus kepada melihat peran pemerintah dinas lingkungan hidup dalam pengembangan objek wisata sedangkan penelitian saya terfokus kepada peran dinas pariwisata dalam pengelolan pariwisata di desa sippan
3	Nur Fadilah (2018) Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan objek wisata alam lewaja di	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode : Kualitatif</li> <li>• Teori : eksperimen</li> <li>• J. Informan : 4 orang</li> <li>• T. Pengumpulan data : Triangulasi data</li> </ul>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Pemerintah (Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata) dalam mendukung yaitu	Persamaan penelitian ini sama-sama terfokus kepada pengelolaan pariwisata sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian saya, penelitian ini terfokus

	kabupaten enrekang	<ul style="list-style-type: none"> <li>T. Analisis data : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis data induktif</li> </ul> </li> </ul> Lokasi : Kabupaten Enrekang	partisipasi masyarakat dan banyaknya potensi pariwisata,	kepada peran dinas pemuda olahraga dan dinas pariwisata sedangkan peneloitian saya terfokus melihat peran dinas pariwisata saja.
4	Nanda Amdi (2021) Peran pemerintah Daerah dalam Pengelolaan pariwisata di Kabupaten Bulukumba	<ul style="list-style-type: none"> <li>Metode : Kualitatif</li> <li>Teori : Sesuai dengan peraturan Bupati No 87 Tahun 2016 yang berlaku yakni dalam hal pengorganisasian dan pengendalian destinasi objek wisata</li> <li>J. Informan : 4 orang</li> <li>T. Pengumpulan data : observasi, wawancara, dokumentasi</li> <li>T. Analisis data : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan data</li> <li>- Reduksi data</li> <li>- Penarikan kesimpulan</li> </ul> </li> </ul> Lokasi : Kabupaten Bulukumba	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba dalam pengelolaan pariwisata terhadap upaya pengorganisasian dan pengendalian destinasi wisata	Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama terfokus dalam pengelolaan pariwisata sedangkan perbedaanya penelitian ini terfokus kepada peran dinas pariwisata dalam upaya pengorganisasian untuk pengembangan destinasi wisata sedangkan penelitian saya terfokus kepada melihat peran dinas Pariwisata dalam pengelolaan objek wisata desa Sippan.
5	Hasni Marddimuni (2015) Peran Pemerintah dalam pengembangan potensi wisata alam Batimurung di Dinas Pariwisata kabupaten Moros	<ul style="list-style-type: none"> <li>Metode : Kualitatif</li> <li>Teori : Pitana dan Gayatri</li> <li>J. Informan : 13 orang</li> <li>T. Pengumpulan data : observasi, wawancara, dokumentasi</li> <li>T. Analisis data : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Triangulasi data</li> <li>- Pengumpulan data</li> <li>- Penarikan kesimpulan</li> </ul> </li> </ul> Lokasi : Kabupaten Moros	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pengembangan potensi wisata alam Bantimurung di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dikatakan belum efektif, dengan alasan karena peran pemerintah sebagai regulator belum mampu melaksanakan amanat Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam, karena pengelolaan pengembangan potensi wisata belum terkelola sesuai dengan perundangan. sedangkan Peran pemerintah sebagai fasilitator mampu menyediakan sarana prasarana, fasilitas wisata meskipun belum memadai, memiliki SDM yang berkualitas meskipun kuantitasnya minim,	Persamaan peneliian ini dengan penelitian saya sama-sama membahas tentang pengembangan potensi wisata alam sedangkan perbedaanya penelitian ini terfokus kepada peran pemerintah dengan merujuk uu no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam, sedangkan penelitian saya terfokus kepada peran dinas pariwisata dalam pengelolaan onjek wisata desa Sippan

*Sumber: Diolah Peneliti, 2022*

Tabel 2.1 penelitian terdahulu diatas menjadi acuan bagi peneliti untuk dapat menjadikan hasil penelitian ini lebih baik dengan mengetahui masing-masing penelitian terdahulu lebih memfokuskan ke bagian mana sehingga dapat di bedakan dengan penelitian ini seperti, penelitian oleh Engga Satruko tahun 2019 dengan judul Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Teluk Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, penelitian ini lebih terfokus pada memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, penelitian oleh Riska tahun 2020 dengan judul Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Pariwisata Kebun Raya Massenrempulu di Kabupaten Enrakang lebih menunjukkan peran dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sektor pariwisata untuk melengkapi sarana dan prasarana dalam penunjang, penelitian oleh Nur Fadilah tahun 20118 dengan judul Peran Pemerintah dalam Pengelolaan objek wisata alam lewaja di kabupaten enerkang, terfokus melihat faktor pendukung yaitu partisipasi masyarakat dan banyaknya potensi pariwisata dan faktor penghambatnya keterbatasan dana serta akses menuju lokasi wisata, penelitian oleh Nanda Amdi tahun 2021 dengan judul Peran Pemerintah daerah dalam pengelolaan pariwisata di kabupaten Bulukumba terfokus pada pengelolaan pariwisata dan peran pemerintah sebagai motivator menyediakan informasi kepariwisataan dan pemasaran melalui media cetak dan media elektronik, memberikan bimbingan dan penyuluhan usaha serta pelatihan berbahasa asing kepada pegawai dan masyarakat lokal serta melestarikan penangkaran kupu-kupu yang telah menjadi ciri khas obyek wisata alam Bantimurung agar tidak punah. 33 terhadap pengorganisasian dan pengendalian

destinasi wisata, dan penelitian yang terakhir oleh Hasni Marddimuni tahun 2015 dengan judul Peran Pemerintah dalam pengembangan potensi wisata alam batimurung di dinas pariwisata kabupaten Maros terfokus dalam melihat peran peran pemerintah sebagai regulator belum mampu melaksanakan amanat UU NO 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam. Menegaskan kembali dengan beberapa perbedaan yang telah disampaikan diatas penelitian ini lebih memfokuskan melihat bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan pariwisata di desa sippan kecamatan Silimahuta kabupaten Simalungun.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif dan analisis data kualitatif yaitu pendekatan pemecahan masalah dengan berdasarkan uraian yang tidak berwujud angka. Tujuan penggunaan metode penelitian kualitatif adalah untuk memudahkan atau lebih memahami informasi dari sumber-sumber yang dijadikan data, sehingga dapat dijadikan pemahaman yang cukup efektif terhadap penelitian strategi pengembangan ekowisata ini. Menurut David Williams (Moleong, 1995:5), penelitian kualitatif adalah upaya peneliti untuk mengumpulkan data berdasarkan lingkungan alam, dan hasil penelitian ilmiah juga dapat dipertanggung jawabkan.

Metode deskripsi kualitatif ini hanya akan menggambarkan satu situasi atau peristiwa. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan, mendeskripsikan situasi terkini yang melingkupi subjek penelitian, berdasarkan fakta dan data yang muncul, menyelidiki dan memecahkan masalah melalui wawancara, menjelaskan permasalahan kepada informan, dan memperoleh data dari hasil tanya jawab tersebut, sehingga penelitian ini cukup jelas menjawab strategi apa yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun dalam pengelolaan pariwisata Desa Sippan.

### 3.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang akan menjadi narasumber dan memberikan informasi tentang kondisi dan situasi penelitian. Oleh karena itu, informan haruslah orang yang berkaitan langsung dengan objek penelitian dan memiliki pengalaman di lapangan tentang latar penelitian. Menurut Bagong (2005:172), informan meliputi jenis-jenis sebagai berikut:

1. Informan kunci, adalah orang yang mempunyai pengetahuan dan memilikin segala macam informasi penting yang dibutuhkan untuk penelitian.
2. Informan utama adalah orang-orang yang secara langsung terkait dengan interaksi sosial yang dimaksud.
3. Informan tambahan adalah seseorang yang dapat memberikan data meskipun ia tidak langsung terlibat dengan komunikasi atau interaksi sosial yang diteliti.

Informan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No	URAIAN	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
1	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun	1	Informan Kunci
3	Ketua Pengelola Objek Wisata Desa Sippan	1	Informan Utama
4	Pengunjung	2	Informan Tambahan
	Jumlah	4	

*Sumber: Diolah Peneliti 2022*

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan untuk memahami Strategi Kementerian

Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke tempat wisata di Bukit Lawang pada masa pandemi. Menurut Supriadi (2011: 98), observasi adalah metode pengumpulan data penelitian ilmiah yang dilakukan di lingkungan alam, dan interaksi tersebut secara alami melibatkan aktor. Selanjutnya Widoyoko (2014:46) menjelaskan bahwa observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap unsur-unsur yang ada pada gejala-gejala yang dialami subjek.

#### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan bagian dari cara untuk mendapatkan sumber atau pengetahuan dalam penelitian. Menurut Esterberg dalam buku Sugiyono (2015:72), wawancara adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau individu dengan tujuan bertukar informasi melalui tanya jawab guna menarik kesimpulan atau makna dari percakapan tersebut. Diantara metode penelitian kualitatif, wawancara merupakan metode penelitian yang paling penting. Teknik yang dilakukan dalam proses wawancara penelitian ini adalah dengan wawancara semi terstruktur, dimana penulis akan melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat, Pengelola objek wisata, penjual tiket masuk objek wisata desa Sippan, dan pengunjung di objek wisata Desa Sippan. Untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dan pihak yang diwawancarai dapat mengemukakan pendapat juga idenya, maka dilakukanlah wawancara semi terstruktur ini. (Esterberg dalam Sugiyono 2015:73).

Dalam melakukan sebuah wawancara terdapat beberapa langkah-

langkah yang dapat dilakukan penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, yaitu:

1. Menyiapkan draft atau pedoman pertanyaan untuk wawancara, agar pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber sesuai dengan tujuan diadakannya wawancara tersebut.
2. Menentukan siapa yang akan menjadi narasumber wawancara, tentu saja seseorang yang memiliki keterkaitan penting dengan penelitian.
3. Menentukan lokasi dan waktu wawancara.
4. Melakukan proses wawancara dengan baik.
5. Dokumentasi.
6. Memastikan hasil wawancara sesuai dengan informasi yang dibutuhkan penulis.
7. Merekap hasil wawancara.

### c. Dokumentasi

Sugiyono (2015:83) berpendapat bahwa dokumentasi merupakan salah satu tahapan yang penting, dimana. Dokumentasi berfungsi sebagai catatan peristiwa dalam suatu kegiatan yang berlangsung, yang dapat berupa kata-kata, gambar, atau karya monumental seseorang. Maka dalam penelitian ini penulis mendokumentasikan dalam bentuk gambar-gambar bersama dengan narasumber, atau sedang mewawancarai narasumber.

### 3.4 Teknik Analisis Data

Sesuai Stainback dalam Sugiyono (2015:88), analisis merupakan gerakan vital dalam proses eksplorasi subjektif dengan tujuan agar spekulasi yang telah ditentukan nantinya dapat diciptakan dan dinilai. Sementara itu, analisis data merupakan proses yang sama pentingnya, yaitu dengan mengklasifikasikan data, mendeskripsikan hasil, membuat pola, mensintesis, menyeleksi mana yang merupakan data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen, serta menyusunnya secara sistematis. Penting, apa yang dipelajari, untuk menarik kesimpulan yang mudah dipahami juga dimengerti penulis begitu juga orang lain (Sugiyono, 2014:244).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (2012 :255) meliputi:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara seperti: observasi, wawancara, dikumentasi dan sebagainya. Data yang dikumpulkan adalah Peran Pemerintah dalam pengelolaan Pariwisata di Desa Sippan.

b. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan selama meneliti untuk memilih informasi yang mana dianggap yang menjadi pusat penelitian lapangan. Banyaknya data yang di dapat dari lapangan akan dipilah-pilah sesuai dengan tujuan penelitian peran Pemerintah dalam Pengelolaan Pariwisata di Desa Sippan.

Untuk mendapatkan pemecahan masalah.

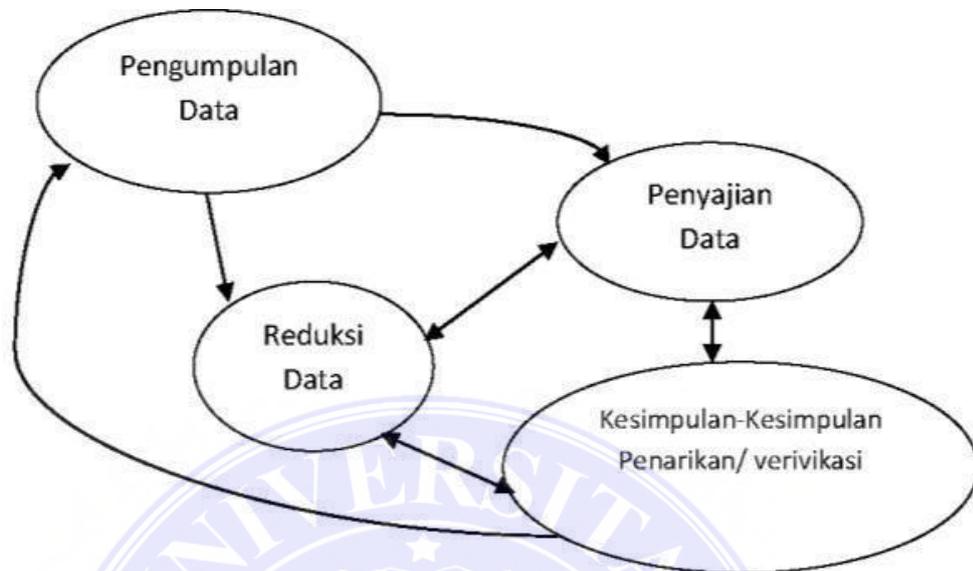
c. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa dan tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman. Alasan dasar dilakukan pada tahapan ini adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang disederhanakan dan mudah dipahami. Dengan adanya penyajian data yang berasal dari tujuan penelitian peran Pemerintah dalam pengelolaan Pariwisata di Desa Sippan Tigaraja Silimahuta Kecamatan Silimahuta Kabupaten Simalungun. Penelitian tentu mendapatkan hasil dari penelitian tersebut.

d. Kesimpulan

Data Setelah data disajikan maka dilakukan kesimpulan data atau verifikasi. Dalam pengambilan keputusan atau verifikasi membuat kesimpulan sementara dari semula belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara di verifikasi. Dalam arti meninjau kembali data yang di dapat dari penelitian peran Pemerintah dalam pengelolaan Pariwisata di Desa Sippan Tigaraja Silimahuta Kecamatan Silimahuta Kabupaten Simalungun memperoleh kesimpulan dari jawaban atas masalah yang diangkat dari penelitian.

**Gambar 3.1 Teknik Analisis Data**



*Sumber : Miles Hubberman (1992:20)*

#### **A. Definisi Konsep**

1. Peran, Peran merupakan salah satu yang dapat dikatakan konsep mengenai hal apa yang harus dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam lingkungan warga dan yang termasuk seperti keharusan dalam berperilaku dari banyak orang pada individu dan juga merupakan tingkah laku dari seseorang individu yang penting untuk suatu struktur sosial di masyarakat.
2. Menurut (Terry, 2009) pengelolaan (management) merupakan sebuah proses khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber- sumber lainnya.
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996, Pengelolaan pariwisata adalah , Pembangunan sarana dan prasarana plengkap beserta fasilitas pelayanan lain bagi pariwisata, Pengelolaan obyek dan daya tarik

wisata alam termasuk sarana dan prasarana yang ada, Penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat disekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan pengusaha obyek dan daya tarik wisata alam bersangkutan.

## **B. Definisi Konsep Operasional**

Konsep Operasional adalah konsep secara jlea mengenai variabelvariabel penelitian untuk memberikan hasil penelitian yang seragam pada semua pengamat (Purwanto, 2007: 93). Kegiatan yang harus dilakukan disini adalah membuat konsep-konsep yang telah di kelompokkan ke dalam variabel agar dapat di ukur, berdasarkan kerangka konsep di atas, maka variabel tersebut dapat dibatasi untuk membentuk kesesuaian dalam penelitian ini.

Kajian ini berkenan dengan Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Desa Sippan Tiga Raja Pamatang Silimahuta Kabupaten 41 Simalungun. Berdasarkan konsep tersebut yang dimaksud adalah segala sesuatu upaya dalam menjalankan strategi dalam pengelolaan wisata di Desa Sippan yang membutuhkan Peran sektor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan khususnya melakukan strategi dalam Pengelolaan wisata di Desa Sippan. Adapun indikator dari Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Desa Sippan Tigaraja Pamatang Silimahuta Kabupaten Simalungun itu adalah :

1. Fasilitator adalah dalah orang yang membantu dan membimbing dalam suatu proses atau kegiatan, terutama dengan mendorong orang untuk menemukan sendiri pemecahan masalah atau tugas. Dia juga seseorang yang memungkinkan sesuatu terjadi dalam hal potensi pariwisata, peran pemerintah ialah berupaya mempersiapkan dan menyediakan semua fasilitas yang diperlukan untuk menyokong semua program yang

dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun. Dalam praktiknya, pemerintah dapat bekerja sama dengan semua pihak secara bersamaan, termasuk swasta dan masyarakat.

2. Motivator itu seorang yang memberikan motivasi kepada siapa saja tapi bersifat langsung atau bertemu. dalam hal pengembangan pariwisata, tentunya pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting. Peran pemerintah daerah selaku motivator sangat dibutuhkan dan penting supaya roda usaha pariwisata terus berputar. Dalam hal ini, investor, masyarakat dan juga pengusaha di bidang pariwisata adalah sasaran penting yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata terus berjalan dengan baik.
3. Dinamisator adalah yang menimbulkan (menjadikan) dinamika. Arti lainnya dari dinamisator adalah hal atau benda yang menyebabkan timbulnya tenaga untuk selalu bergerak dan sebagainya. Dinamisator dalam pilar-pilar pemerintahan yang baik, untuk menjamin kesinambungan pembangunan yang seimbang, pemerintah, swasta, dan masyarakat harus berupaya untuk mendayagunakan sinergi fungsi masing-masing dengan baik. Sebagai salah satu pemangku kepentingan pengembangan pariwisata, pemerintah daerah dapat memainkan efek sinergis dari ketiga variabel tersebut agar dapat melakukan segala upaya untuk menciptakan hubungan simbiosis bagi kebangkitan pariwisata di masa depan.

Suatu program dapat diukur dengan melihat hasil yang dicapai. Hal tersebut tentu saja tidak boleh menyimpang dari tujuan. Jika memang tujuan sudah tercapai dengan waktu, tepat pelaksanaan dan tepat kualitas, maka dari

suatu program dapat dikatakan baik. Karena keempat komponen tersebut di atas telah terpenuhi, maka dari itu telah teruji. Dari paparan di atas diambil kesimpulan bahwa indikator tujuan yang di rencanakan dalam perencanaan dapat terwujud. Pelaksanaan dalam perencanaan dapat terealisasi dengan baik, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tercapainya tujuan seperti yang telah ditetapkan.

### 3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi merupakan objek yang diteliti, dimana lokasi penelitian merupakan hal terpenting dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis memilih Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun sebagai lokasi penelitian. Lokasinya berada di Gg. Sumbayak, Bahapal Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun. Adapun Desa Sippan sebagai objek wisata yang akan diteliti lokasinya berada di Tiga Raja, Kecamatan Pamatang Silimahuta, Naga Saribu, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Penelitian ini dilaksanakan bulan November 2022 sampai Januari 2023.

**Tabel 3.2**  
**Rincian Jadwal Penyelesaian Skripsi**

No	Urutan Kegiatan	2022				2023						
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
1	Pengajuan Judul											
2	Penyusunan Proposal											
3	Seminar Proposal											
4	Perbaikan Proposal											
5	Penelitian											
6	Penyusunan Skripsi											
7	Seminar Hasil											
8	Perbaikan Skripsi											
9	Sidang Meja Hijau											
10	Revisi Final Skripsi											
11	Penyerahan Skripsi Ke Prodi											

*Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2022*

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, penulis dapat menyimpulkan bahwa;

1. Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun dalam pengelolaan objek wisata Desa telah dilaksanakan namun belum memberikan hasil yang optimal, hal ini didasarkan pada analisis dari teori Pitana dan Gayatri, Sebagai motivator, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun telah melaksanakan perannya namun belum optimal yaitu melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi dan pengarahan kepada masyarakat juga pelaku wisata di objek wisata Desa Sippan, Sebagai fasilitator, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun telah melaksanakan perannya namun belum maksimal dalam memberi fasilitas sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang baik untuk objek wisata desa. Sebagai dinamisator, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun belum melakukan kerja sama antara pihak manapun baik pemerintah desa maupun pihak-pihak yang bersangkutan dalam pengelolaan objek wisata desa sippan.
2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun
  - a. Daya tarik objek wisata Desa Sippan yang cukup baik untuk dikelola menjadikan objek wisata prioritas dengan adanya peran Dinas Pariwisata Simalungun terbatas pengembangnya dengan kurangnya komunikasi pemerintah desa Sippan kepada pihak Dinas pariwisata Simalungun

- b. sehingga keterlambatan dalam proses pengelolaan objek wisata desa Sippan belum maksimal di lakukan.
- c. Aksesibilitas dan fasilitas umum yang masih kurang dan perlu di benahi dan di tambah perbaikannya.

## 5.2 Saran

Adapun saran dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun disarankan lebih memperhatikan lagi pada objek wisata Desa Sippan dengan lebih aktif melakukan kegiatan rutin maupun kegiatan tahunan, seperti sosialisasi dan pelatihan sadar wisata bagi masyarakat setempat, dan juga lebih aktif dan konsisten mempromosikan daya tarik alam objek wisata Desa Sippan yang menyuguhkan keindahan alam dan daya tarik wisata Desa Sippan itu sendiri untuk meningkatkan kunjungan wisatawan
2. Diharapkan Pemerintah Daerah dapat membenahi aksesibilitas dan fasilitas umum di objek wisata Desa Sippan agar menunjang kemajuan wisatawan serta kenyamanan saat berkunjung ke objek wisata Desa Sippan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adisasmita, Rahardjo, 2011, *Manajemen Pemerintah Daerah*, Yogyakarta : Graha Ilmu Andi Gadjong
- Agussalim, 2007, *Pemerintahan Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta : Bina Aksara
- Achmadi, 1997, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara. Departemen Agama RI, 2008, *Al-Quran dan Terjemahan*, Semarang: CV Toha Putra. Fatoni, Abdurrahmat, 2011, *Metode Penelitan dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta Hadi
- Bagyo, 2007, *Pariwisata dan Perhotelan*, Bandung: Alfabeta, Colid Narbuko.
- Duverger, Maurice. 2010. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Satruko, Engga. 2019. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Teluk Kiluan*. Universitas Islam Negeri Raden Intan lampug.
- M. Iqbal, 2002, *Pokok-Pokok Metodelogi Penelitian Dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- I Gede Pitana, I Ketut Surya Dirta, 2009, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta : Andi Janianto
- Helmut F, 2006, *Perencanaan Ekowisata: dari Teori ke Aplikasi*, Yogyakarta: Andi. Kartono
- Kartini 1996, *Pengantar Metodelogi Riset Sosial*, Bandung : Mandar Maju. M. Liga Suryadana
- Vanny Octavia, 2015, *Pengantar Pemasaran Pariwisata*, Bandung : Alfabeta
- Nawawi, Hadari , 2015, *Metode Penelitian Bidang Sosial jilid ke 14*, Yogyakarta: UGM Pers Ndaha
- Richard Sihite dalam Marpaung dan Bahar. 200:46-47. *Pariwisata*.
- Soekanto, Soerjono, 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutarto. 2009, *Mastering JavaTM Konsep Pemrograman dan Penerapannya Untuk Membuat Software Aplikasi*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Taliziduhu, 2005, *Kybernologi Sebuah Rekonsttruksi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : PT Rineka Cipta Soekanto
- Tjokroamidjojo, 1988. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta.
- Soerjono, 1987, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Sunarno
- Siswanto, 2008, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Gamal, 2004, *Dasar dasar Pariwisata*, Yogyakarta: Andi Syabani, Fatkhuri, 2016, *Teori Sosiologi*, Bogor: Ghadia Indonesia. Tika
- Moh Pabundu, 2006, *Metode Riset Bisnis*, Jakarta : PT Bumi Aksara
- Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Waluyo, Hany, 1994/1995, *Setrategi Adaptasi Masyarakat Terhadap Program Pengembangan Pariwisata*, Jakarta : Depdikbud
- Yoeti, Oka A, et.all, (2006). *Pariwisata Budaya Masalah Dan Solusinya*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

### **Perundang-undangan**

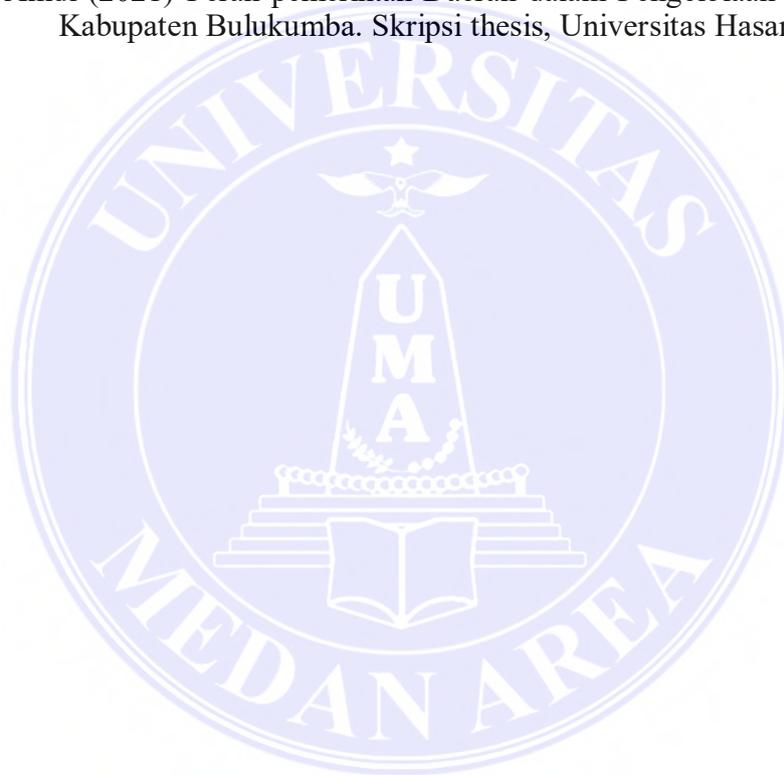
Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1014 Tentang Pemerintahan

### **Artikel Ilmiah/Jurnal**

Riska,(2020). Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Pariwisata Kebun Raya Massenrempuludi Kabupaten Enrekang. Universitas Muhammadiyah Makasar.

Nur Fadilah (2018)Peran Pemerintah Dalam Pengelolaanobjek wisata alam lewaja di kabupatenenrekang. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makasar.

Nanda Amdi (2021) Peran pemerintah Daerah dalam Pengelolaan pariwisata di Kabupaten Bulukumba. Skripsi thesis, Universitas Hasanudin



## LAMPIRAN 1 PEDOMAN OBSERVASI

### PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI DESA SIPPAN TIGA RAJA PAMATANG SILIMAHUTA KABUPATEN SIMALUNGUN

Dalam pengamatan (observasi) yang di lakukan adalah mengamati keadaan objek wisata desa Sippan dalam pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun:

- A. Tujuan : Untuk memproleh informasi dan data mengenai kondisi fisik maupun non fisik objek wisata desa.
- B. Aspek yang diamatai:

NO	URAIAN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	Alamat/lokasi Ekowisata.			
2	Lingkungan Fisik Ekowisata pada umumnya.			
3	Fasilitas/unit di sekitar ekowisata.			
4	Suasana/iklim kehidupan sehari-hari secara sosial.			
5	Prosen kegiatan apa saja yang ada di sekitar ekowisata Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang di arahkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun.			

## LAMPIRAN 2 PEDOMAN WAWANCARA

### PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI DESA SIPPAN TIGA RAJA PAMATANG SILIMAHUTA KABUPATEN SIMALUNGUN

#### Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun

Kelengkapan, ketepatan waktu, dan keakuratan informasi sangat diharapkan dalam proposal penelitian ini, karena itu peneliti hanya mengajukan garis besar rencana wawancara yang akan diperdalam saat melakukan wawancara dengan informan.

A. Tujuan : Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun.

B. Pertanyaan panduan :

a. Identitas diri

- 1) Nama :
- 2) Agama :
- 3) Jenis kelamin
- 4) Pekerjaan :
- 5) Alamat
- 6) Pendidikan terakhir :

b. Pertanyaan penelitian

- 1) Sejauh mana peran yang telah dilakukan dalam pengelolaan objek wisata desa Sippan ?
- 2) Apa motivasi yang dilakukan dinas pariwisata terhadap pengelolaan objek wisata desa Sippan baik terhadap masyarakat maupun aspek lainnya ?
- 3) Kebijakan apa yang sudah dilakukan dalam mengajak masyarakat untuk membantu mengembangkan dalam pengelolaan objek wisata desa Sippan ?
- 4) Bagaimana keadaan fasilitas umum ataupun sarana dan prasarana di wisata desa Sippan ?
- 5) Apakah ada tindakan mengenai pembenahan fasilitas oleh dinas pariwisata agar mendukung sarana dan prasarana dalam pengelolaan objek wisata desa sippan ?
- 6) Apakah dinas pariwisata ada berkerja sama dengan pihak organisai misalnya dalam pengelolaan objek wisata desa Sippan ?
- 7) Pembangunan apa yang sudah dilakukan oleh dinas pariwisata dalam pengelolaan objek wisata desa sippan sejauh ini?

## **Pelaku wisata/wisatawan**

### A. Pertanyaan panduan

#### a. Identitas diri

- 1) Nama :
- 2) Jabatan :
- 3) Agama :
- 4) Jenis kelamin :
- 5) Pekerjaan :
- 6) Alamat :
- 7) Pendidikan terakhir

#### b. Pertanyaan penelitian

- 1) Sejauh mana peran yang telah dilakukan dalam pengelolaan objek wisata desa Sippan ?
- 2) Apa motivasi yang dilakukan dinas pariwisata terhadap pengelolaan objek wisata desa Sippan baik terhadap masyarakat maupun aspek lainnya ?
- 3) Kebijakan apa yang sudah dilakukan dalam mengajak masyarakat untuk membantu mengembangkan dalam pengelolaan objek wisata desa Sippan ?
- 4) Bagaimana keadaan fasilitas umum ataupun sarana dan prasarana di wisata desa Sippan ?
- 5) Apakah ada tindakan mengenai pembenahan fasilitas oleh dinas pariwisata agar mendukung sarana dan prasarana dalam pengelolaan objek wisata desa sippan ?
- 6) Apakah dinas pariwisata ada berkerja sama dengan pihak organisasi misalnya dalam pengelolaan objek wisata desa Sippan ?
- 7) Pembangunan apa yang sudah dilakukan oleh dinas pariwisata dalam pengembangan objek wisata desa sippan?

### LAMPIRAN 3 HASIL OBSERVASI

#### PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI DESA SIPPAN TIGA RAJA PAMATANG SILIMAHUTA KABUPATEN SIMALUNGUN

Dalam pengamatan (observasi) yang di lakukan adalah mengamati keadaan objek wisata desa Sippan dalam pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun:

- C. Tujuan : Untuk memproleh informasi dan data mengenai kondisi fisik maupun non fisik objek wisata desa.
- D. Aspek yang diamatai:

NO	URAIAN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	Alamat/lokasi Ekowisata.	✓		Ada
2	Lingkungan Fisik Ekowisata pada umumnya.	✓		Ada
3	Fasilitas/unit di sekitar ekowisata.	✓		Ada
4	Suasana/iklim kehidupan sehari-hari secara sosial.	✓		Ada
5	Prosen kegiatan apa saja yang ada di sekitar ekowisata Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang di arahkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun.	✓		Ada

#### LAMPIRAN 4 HASIL WAWANCARA

### PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI DESA SIPPAN TIGA RAJA PAMATANG SILIMAHUTA KABUPATEN SIMALUNGUN

#### Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun

Kelengkapan, ketepatan waktu, dan keakuratan informasi sangat diharapkan dalam proposal penelitian ini, karena itu peneliti hanya mengajukan garis besar rencana wawancara yang akan diperdalam saat melakukan wawancara dengan informan.

C. Tujuan : Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun.

D. Pertanyaan panduan :

a. Identitas diri

- 1) Nama : Herry Sudrajat SE
- 2) Agama : Islam
- 3) Jenis kelamin: Laki-laki
- 4) Pekerjaan : ASN
- 5) Pendidikan terakhir : S1

b. Pertanyaan penelitian

- 1) Apa motivasi yang dilakukan dinas pariwisata terhadap pengelolaan objek wisata desa Sippan baik terhadap masyarakat maupun aspek lainya ?

Jawaban: dinas pariwisata sebagai motivator disini sudah beberapa upaya untuk memotivasi rekan-rekan di objek wisata Desa Sippan. Adapaun kami melakukan sosialisasi atau kegiatan sadar wisata untuk ikut serta dalam pengelolaan potensi wisata agar pemerintah desa dan bagian aparatur desa khususnya desa sippan dapat ikut mendukung dan melaporkan keperluan dalam pengelolaan objek wisata Desa Sippan Tak hanya itu, tim juga berusaha menggali potensi baru dari objek wisata Bukit Lawa agarng menarik perhatian para pengunjung lagi. Dari itu kita harapkan nanti setelah dibuka kembali, akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan agar lebih ramai lagi. Tetapi mengenai seperti pelatihan belum ada kami berikan kepada pengelola objek wisata Desa Sippan, Kami hanya berkunjung dan meninjau lokasi melihat apa yang di butuhkan”

- 2) Bagaimana keadaan fasilitas umum ataupun sarana dan prasarana di wisata desa Sippan ?

Jawaban: berbicara mengenai fasilitas ataupun aksebuilitas menuju objek wisata desa sippan masih di perhatikan pihak dinas pariwisata telah berupaya merekomendasikan akan pemenuhan fasilitas untuk objek wisata desa sippan agar di benahi oleh pemerintah kabupaten”

- 3) Apakah dinas pariwisata ada berkerja sama dengan pihak organisai misalnya dalam pengelolaan objek wisata desa Sippan ?

Jawaban: “pihak dinas pariwisata simalungun sudah melukan kunjungn sebagai tinjauan langsung terhadap objek wisata desa sippan hanya itu yang masih kami lakukan, untuk proses lebih lanjutnya kami menunggu laporan apa saja yang di butuhkan sebagai penunjang dalam pengelollan pariwisata desa sippan dari tingkat desa maupun tingkat kecamatan agar apa yang mereka butuhkan seperti pelatihan dan sebagainya dapat kami penuhu dan lakukan.



## HASIL WAWANCARA

### PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI DESA SIPPAN TIGA RAJA PAMATANG SILIMAHUTA KABUPATEN SIMALUNGUN

#### Pelaku wisata/wisatawan

#### A. Pertanyaan panduan

##### a. Identitas diri

- 1) Nama : Lasmahita
- 2) Agama : Kristen
- 3) Jenis kelamin : Perempuan
- 4) Pekerjaan : Pengelola Objek Wisata
- 5) Alamat : Desa Sippan
- 6) Pendidikan terakhir : SMA

##### b. Pertanyaan penelitian

- 1) Apa motivasi yang dilakukan dinas pariwisata terhadap pengelolaan objek wisata desa Sippan baik terhadap masyarakat maupun aspek lainnya ?

Jawaban: “sejauh ini memang pihak dari pemerintah terutama dari Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun sudah berkunjung kemari tetapi mereka hanya meninjau lokasi objek wisata desa sippan dan menyuruh untuk mengurus surat izin dari dinas agar orang dinas pariwisata dapat ikut serata dalam pengelolaan objek wisata desa sippan

- 2) Bagaimana keadaan fasilitas umum ataupun sarana dan prasarana di wisata desa Sippan ?

Jawaban: sejauh ini memang pihak dari pemerintah terutama dari Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun sudah berkunjung kemari tetapi mereka hanya meninjau lokasi objek wisata desa sippan dan menyuruh untuk mengurus surat izin dari dinas agar orang dinas pariwisata dapat ikut serata dalam pengelolaan objek wisata desa sippan

- 3) Pembangunan apa yang sudah dilakukan oleh dinas pariwisata dalam pengembangan objek wisata desa sippan dan Apakah dinas pariwisata ada berkerja sama dengan pihak organisai misalnya dalam pengelolaan objek wisata desa Sippan?

Jawaban: “belum adanya sama sekali perhatian dari dinas pariwisata terhadap pengelollan pariwisata desa Sipan terhadap kami hanya saja mereka mengatakan untuk melapor terhadap kepala desa Sippan akan mengenai pengelollan pariwisata Desa Sippan yang akan terus berkembang, kami sudah melaporkanya tetapi hingga saat ini belum ada perkembangn dari apa yang telah kami sampaikan kepada pihak orang kantor desa”

## HASIL WAWANCARA

### PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI DESA SIPPAN TIGA RAJA PAMATANG SILIMAHUTA KABUPATEN SIMALUNGUN

#### Pelaku wisata/wisatawan

##### A. Pertanyaan panduan

###### a. Identitas diri

- 1) Nama : Sukri
- 2) Agama : Islam
- 3) Jenis kelamin : Laki-laki
- 4) Pekerjaan : Mahasiswa
- 5) Alamat : Medan

###### b. Pertanyaan penelitian

- 1) Sejauh mana peran yang telah dilakukan dalam pengelolaan objek wisata desa Sippan dan Apa motivasi yang dilakukan dinas pariwisata terhadap pengelolaan objek wisata desa Sippan baik terhadap masyarakat maupun aspek lainya ?

Jawaban: “Seharusnya dengan potensi wisata yang sebgas ini harus ada peran penuh dari pemerintah mengenai pengembangnya agar lebih baik lagi untuk kedepanya baik melakukan hal-hal seperti kunjungn mempotivasi kepada masyarakat sekitar sini untuk ikut serta pengelolaan objek wisata desa Sippan”

- 2) Bagaimana keadaan fasilitas umum ataupun sarana dan prasarana di wisata desa Sippan ?

Jawaban : fasilitas yang terdapat di objek wisata desa sippan masih kurang memadai sepeerti toilet yang baik, tempat ibadah seperti mushala belum ada terlebihlagi akses jalan menuju objek wisata desa sippan cukup prihatin sepeerti jalan berbatu dan tanjakan yang rusak mempersulit pengunjung untuk masuk ke wisata desa sippan

- 3) Apakah dinas pariwisata ada berkerja sama dengan pihak organisai misalnya dalam pengelolaan objek wisata desa Sippan ?

Jawaban: sepertinya saya melihat belum ada kerja sama antara pihak pengelola objek wisata desa Sippan dengan masyarakat sekitar karna dari yang saya tangkap sepertinya wisata desa sippan ini hanya di kelola oleh perorang saja seharusnya ada keterlibatan masyarakat setempat dalam pengelolanya contohnya pemuda setempat”

## HASIL WAWANCARA

### PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI DESA SIPPAN TIGA RAJA PAMATANG SILIMAHUTA KABUPATEN SIMALUNGUN

#### Pelaku wisata/wisatawan

#### A. Pertanyaan panduan

##### a. Identitas diri

- 1) Nama : Vigi
- 2) Agama : Islam
- 3) Jenis kelamin : Perempuan
- 4) Pekerjaan : Mahasiswa
- 5) Alamat : Medan

##### b. Pertanyaan penelitian

- 1) Apa motivasi yang dilakukan dinas pariwisata terhadap pengelolaan objek wisata desa Sippan baik terhadap masyarakat maupun aspek lainya dan Sejauh mana peran yang telah di lakukan dalam pengelolaan objek wisata desa Sippan?

Jawaban: “Objek wisatanya cukup bagus dengan pemandangan alam yang senjuk harus memang di kelolah penuh dinas pariwisata agar lebih maju dalam peningkatan pengembangn wisata desa sippan ini dengan cara-cara yang di butuhkan mengenai sosialisai mungkin perlu untuk dilakukan kepada masyarakat setempat karena menurut saya masyarakat setempat kurang memperhatikan akan potensi wisata ini”

- 2) Bagaimana keadaan fasilitas umum ataupun sarana dan prasarana di wisata desa Sippan ?

Jawaban? fasilitas di objek wisata ini masih kurang kamar mandi yang masih minim butuh perbaikan dan tempat ibadah untuk shalat juga belum ada tempat untuk berjualan juga belum disediakan seharusnya peran pemerintah membantu akan hal ini”

- 3) Apakah dinas pariwisata ada berkerja sama dengan pihak organisai misalnya dalam pengelolaan objek wisata desa Sippan ?

Jawaban: “Saya tidak melihat adanya komunitas-komunitas wisata yang ikut mendukung akan objek wisata desa Sippan ini seperti penjualan soevenir ataupun pusat oleh-oleh yang terdapat di desa Sippan ini

## LAMPIRAN 5 DOKUMENTASI PENELITIAN



**Wawancara Bersama Kasi Destinasi  
Pariwisata Adyatama Kepariwisataaan  
Ekonomi Kreatif**

**Bapak Herry Sudrajat SE**





### **Wawancara Bersama Pengelola Objek Wisata Desa Sippan**

**Ibu Lasmahita Br Marbun**



### **Wawancara Bersama Salah Satu Pengunjung Objek Wisata Desa Sippan**

**Saudara Sukri**



### **Wawancara Bersama Salah Satu Pengunjung Objek Wisata Desa Sippan**

**Saudari Vigi**



### **Dokumentasi Sarana Seperti Toilet yang Membutuhkan Perbaikan**



### **Bangunan Serba Guna yang Digunakan Untuk Tempat Ibadah (Shalat)**



**Kondisi Jalan Menuju Objek Wisata Desa Sippan yang Berbatu**



**Objek Wisata Desa Sippan**



## LAMPIRAN 6 SURAT IZIN RISET DARI FAKULTAS

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

Nomor : *027* /FIS.1/01.10/1/2023 16 Januari 2023  
Lamp : -  
Hal : Pengambilan Data/Riset

Yth,  
Ka. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kab. Simalungun  
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Novita Ratna Sari Br Siregar  
N P M : 208510024  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset ke Kantor Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kab. Simalungun, dengan judul Skripsi "**Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Desa Sippan Tigaraja Pamatang Silimahuta Kecamatan Silimahuta Kabupaten Simalungun**"

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si

CC : File,-



## LAMPIRAN 7 SURAT BALASAN DINAS

**PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA  
DAN EKONOMI KREATIF  
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA**  
KODE POS : 21162

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
NOMOR : 00.9 / 197 /19.1/2023.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZAHARA TARIGAN GIRSANG, SH  
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIMALUNGUN

Dengan memperhatikan Surat dari

1. Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor: 052/FIS.1/01.10/1/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Pengambilan Data/Riset.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 00.9/46/26.2/2023 tanggal 10 Februari 2023 perihal Surat Rekomendasi/Izin Pengambilan Data/Riset.

Menerangkan bahwa:

Nama : Novita Ratna Sari Br. Siregar  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jln. Medan Binjai KM. 12,5 Gang Kutilang.  
Rencana Judul Skripsi : Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Pariwisata di Desa Sippan Tigaraja Pamatang Silimahuta Kecamatan Silimahuta Kabupaten Simalungun.

telah melaksanakan penelitian/pengambilan Data/Riset di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Simalungun.

Demikian surat keterangan penelitian ini kami sampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamatang Raya  
Pada tanggal : 02 Maret 2023

An. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA  
DAN EKONOMI KREATIF  
SEKRETARIS.

  
ZAHARA TARIGAN GIRSANG, SH  
NIP. 196709041993032004